
ANALISIS WACANA KRITIS VAN DIJK PEMBERITAAN PADA PROGRES IBU KOTA NEGARA INDONESIA

Oleh

Karyani Tri Tialani¹, Yusak Hudiono²

^{1,2}Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Mulawarman

Email: ¹nataya.kirana@gmail.com, ²yusak.hudiono@fkip.unmul.ac.id

Article History:

Received: 17-04-2023

Revised: 20-05-2023

Accepted: 23-05-2023

Keywords:

Pemindahan Ibu Kota Negara, Perencanaan Inklusif, Perencanaan Wilayah Partisipatif, Wacana Krisis Teun A. Van Dijk

Abstract: Penelitian ini menganalisis ideologi yang terdapat pada portal berita CNBC Indonesia tentang pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. Pusat-pusat pemerintahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur. Seiring progres perencanaan dan persiapan implementasi wacana ini, opini publik masih didominasi sentimen negatif. Salah satu isunya adalah partisipasi publik. Sebagai inti dari demokrasi, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan di Republik Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Penelitian ini bermaksud meninjau proses perencanaan IKN yang sudah terlaksana dari perspektif teori tangga partisipasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif menggunakan teori dasar analisis wacana kritis dari Teun A. Van Dijk. Dalam menganalisa data, peneliti melakukan beberapa tahap, yaitu peneliti mengumpulkan semua data yang akan diteliti sebagai bahan analisa, kemudian menentukan kategorisasi, fokus penelitian dengan menggunakan analisis wacana Teun A. Van Dijk. Peneliti setelah itu akan mengungkap struktur teks berita sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan yaitu dengan model wacana Teun A. Van Dijk, yakni melihat pemakaian bahasa dari struktur teks. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan wilayah partisipatif pada proyek IKN ada pada derajat tokenisme atau simbolisme. Hasil dari penelitian ini dibahas melalui analisis struktur makro, analisis superstruktur (skematik), dan analisis struktur mikro

PENDAHULUAN

Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia yang saat ini diperankan oleh Provinsi DKI Jakarta, memiliki peran sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Dwifungsi ini menyebabkan terus meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal dan tinggal sementara. Hal tersebut belum bisa diimbangi dengan kemampuan lingkungan dan perencanaan kota (Huynh, 2020). Pencemaran air sungai (Costa et al., 2016), urban heat island dan polusi udara (Syamsudin & Lestari, 2017), banjir (Asdak et al., 2018; Renald et al., 2016), adalah sebagian dari permasalahan yang tidak kunjung menemukan penyelesaiannya.

Sebagai kota yang terletak di pesisir, tempat terjadinya interaksi antara bentang lahan daratan dan lautan (Harris et al., 2019), DKI Jakarta juga memiliki potensi bahaya yang

berkaitan dengan laut dan perubahan iklim (Firman et al., 2011; Goh, 2019; Nurhidayah & McIlgorm, 2019). Beban bangunan dan infrastruktur yang diberikan di atas kota, memberikan bahaya subsidensi atau penurunan permukaan tanah (Andreas et al., 2018; Chaussard et al., 2013; Park et al., 2016). Wilayah-wilayah yang tepat berbatasan langsung dengan laut berpotensi menjadi wilayah terdampak banjir (Latief et al., 2018; Takagi et al., 2016). Bahaya ini dapat semakin besar dengan salah satu fenomena perubahan iklim yakni kenaikan permukaan air laut (Firman et al., 2011). Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi faktor pendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk memindahkan salah satu fungsi yang diampu DKI Jakarta, yakni sebagai pusat pemerintahan (He & Silliman, 2019).

Harapannya, dengan dipindahkannya salah satu pusat kegiatan ini dapat membantu mengurangi penduduk DKI Jakarta, sehingga penyelesaian permasalahan dapat lebih mudah tercapai. Di sisi lain, Republik Indonesia tengah menggeser fungsi IKN yang tadinya primer (pusat ekonomi dan pemerintahan) menjadi ibu kota sekunder seperti Washington D.C Amerika Serikat, Canberra, Australia, dan Putrajaya, Malaysia (Mayer et al., 2016).

Isu pemindahan IKN ini sudah digaungkan bahkan sejak zaman kolonial, dengan isu yang relatif sama yakni permasalahan lingkungan DKI Jakarta yang “kelebihan muatan”. Isu ini kembali ramai setelah Presiden Republik Indonesia terpilih (2019–2024), Ir. Joko Widodo mengumumkan lokasi baru IKN pada pidato kenegaraannya pasca pelantikan (Agustus, 2019). Dilanjutkan dengan sayembara desain tata kota IKN yang baru, penentuan dewan penasihat, penentuan konsultan asing, rekrutmen pegawai khusus pemindahan IKN, hingga mulai menggaet berbagai investor. Pengamatan terhadap pembahasan isu ini di ruang publik bisa menunjukkan peningkatan meskipun saat ini mengalami penurunan (di bulan Januari, 2020), namun polanya masih cenderung sama yakni naik-turun sebagai respon dari apa-apa yang sudah dipublikasikan oleh pemerintah.

Partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan (Cox, 2010). Partisipasi publik juga merupakan inti pemerintahan demokrasi (Arnstein, 1969; Rawat & Yusuf, 2020; Sanoff, 2005). Dengan sistem politik demokrasi yang dianut oleh Republik Indonesia, adanya ruang-ruang yang baik untuk partisipasi publik menjadi sebuah keniscayaan. Di samping itu, salah satu komponen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah kebijakan-kebijakan yang inklusif, di mana hal tersebut membutuhkan adanya partisipasi publik (Bajracharya & Khan, 2020; Sridhar et al., 2020).

Dalam konteks perencanaan kota, partisipasi publik juga memainkan peran penting (Brabham, 2009; Du et al., 2020; Rania 2017). Adanya ruang-ruang diskusi bagi masyarakat luas untuk berkontribusi dalam penentuan perencanaan tata ruang menjadikan keputusan dan perencanaan kota lebih inklusif. Hal ini menjadi indikator tercapainya pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai agenda perkotaan (New Urban Agenda), melalui terpenuhinya tujuan 11 yakni menciptakan kota yang inklusif (Afzalan et al., 2017; Dahiya & Das, 2020; Farinosi et al., 2019).

Dietz dan Stern (2008) berpendapat bahwa partisipasi publik berpotensi untuk meningkatkan kualitas dan legitimasi dari suatu kebijakan. Hal tersebut dapat turut meningkatkan kualitas lingkungan. Partisipasi publik ini juga merupakan bagian dari konsepsi kota layak huni atau livable cities, yakni adanya ruang bagi pemenuhan hak-hak warga negara untuk memberikan pendapat dan memiliki kuasa atas ruang hidup mereka

(Mueller et al., 2018). Prasyaratnya adalah: partisipasi publik tersebut dijalankan dengan baik.

Perkembangan teknologi yang saat ini terjadi dan diterima di masyarakat, yakni maraknya penggunaan media sosial sebagai ruang untuk menyampaikan pendapat. *United Nations Industrial Development Organization* (2015) menyebutkan bahwa sosial media dapat menjadi peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Perumusan strategi partisipasi publik yang baik terlebih dahulu dapat dilakukan melalui identifikasi kekurangan dan permasalahan yang terjadi pada proses perencanaan. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk meninjau derajat partisipasi publik yang sudah dilakukan pemerintah dalam tahap penentuan lokasi dan desain tata kota IKN melalui dinamika isu tersebut pada portal berita CNBC Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan prosedur kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah dalam proses-proses pemindahan IKN selanjutnya.

METODE

Data primer diambil dari portal berita CNBC Indonesia pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Dalam menganalisa data, peneliti melakukan beberapa tahap, yaitu peneliti mengumpulkan semua data yang akan diteliti sebagai bahan analisa, kemudian menentukan kategorisasi, fokus penelitian dengan menggunakan analisis wacana Teun A. Van Dijk. Peneliti setelah itu akan mengungkap struktur teks berita sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan yaitu dengan model wacana Teun A. Van Dijk, yakni melihat pemakaian bahasa dari struktur teks. Data tersebut dipilih karena menurut peneliti topik tersebut masuk ke dalam bahasan yang cukup penting yaitu mengenai wacana ibu kota baru atau pemindahan ibu kota baru. Selain itu, topik tersebut juga cukup ramai diperbincangkan baik secara langsung maupun di media social serta data yang peneliti ambil mencakup berbagai latar belakang narasumber sehingga peneliti dapat melihat keberpihakkan pro dan kontra mengenai isu ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kritis di mana data yang ada perlu dikritisi dalam analisisnya. Menurut Djadjasudarma (1993) metode tersebut merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau data lisan pada masyarakat Bahasa. Metode ini mampu memberikan gambaran data secara sistematis dan akurat serta hubungannya dengan fenomena-fenomena yang diteliti. Fenomena dalam penelitian ini bersumber pada pengamatan kualitatif atau naturalistik (Kirk, Miller, & Miller, 1986), yakni sumber data primer berupa data bahasa lisan yang dituturkan oleh narasumber maupun narasi yang terdapat dalam kanal berita CNBC Indonesia tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini sumber penunjang lainnya juga digunakan sebagai data sekunder seperti artikel jurnal, info grafis, maupun pemberitaan yang berkaitan dengan topik bahasan.

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan data dalam bentuk angka. Pendekatan kualitatif merupakan proses sistemasi dari penelitian-penelitian di ilmu sosial serta memberikan ruang bagi peneliti untuk mendekati kondisi riil dengan lebih baik (Alasuutari, 2010; Aspers & Corte, 2019). Kalra et al., (2013) menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki fokus untuk memahami suatu pertanyaan penelitian dalam konteks humanistik atau idealis. Kedua konteks ini bisa disesuaikan dengan tujuan penelitian dan ontologi dari keilmuan yang

akan dikontribusikan. Pada makalah ini, pendekatan yang kedua akan dipilih dengan pertimbangan makalah ini dapat memberikan perspektif dari konsep teoritik perencanaan partisipatif pada proses perencanaan megaproyek Republik Indonesia tahun ini dan beberapa tahun mendatang, yakni pemindahan ibu kota negara.

Dalam menganalisa data, peneliti melakukan beberapa tahap, yaitu peneliti mengumpulkan semua data yang akan diteliti sebagai bahan analisa, kemudian menentukan kategorisasi, fokus penelitian dengan menggunakan analisis wacana Teun A. Van Dijk. Peneliti setelah itu akan mengungkap struktur teks berita sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan yaitu dengan model wacana Teun A. Van Dijk, yakni melihat pemakaian bahasa dari struktur teks.

Tinjauan kronologis pelaksanaan proses pemindahan IKN dilakukan dengan mengumpulkan data dari media surat kabar elektronik. Proses validasi untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap konten dari sumber-sumber yang dipilih serta analisis partisipasi publik dalam proses perencanaan IKN dilakukan dengan metode triangulasi sumber (Bachri, 2010), yakni dengan membandingkan antara media dari perusahaan, media pemerintah, dan sosial media pemangku kepentingan. Selain itu, dilakukan juga perbandingan dengan laporan atau hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan 16 sumber berita sebagai sumber untuk tinjauan kronologis proyek pemindahan IKN. Metode seperti ini pernah dilakukan oleh Salim & Negara (2016) untuk memahami konteks dan situasi dari perkembangan pelaksanaan suatu proyek.

1. Arti dan Fungsi Suatu Ibukota Negara

Ibu kota (a capital; capital city; political capital) merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara; secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan. Berasal dari bahasa Latin caput yang berarti kepala (head) kemudian dikaitkan dengan kata capitol yang berarti letak bangunan pusat pemerintahan utama dilakukan. Sejarahnya, ibu kota terbentuk melalui suatu penaklukan atau penggabungan. Ibu kota sebagai pusat perekonomian utama dari suatu wilayah juga senantiasa dijadikan titik pusat dari kekuatan politik, sehingga mempunyai daya tarik tersendiri yang diperlukan untuk efisiensi administrasi pemerintahan seperti ahli hukum, jurnalis dan peneliti kebijakan publik. Ibu kota merupakan pusat ekonomi, budaya atau intelektual.

Ibu kota telah menjadi simbol pemerintahan dan kenegaraan, serta menjadi tempat berkembangnya muatan politik, perekonomian dan budaya. Di kota-kota abad pertengahan, pemilihan dan pendirian suatu ibu kota modern terbentuk atas landasan emosional. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut (1962):

1. Athena yang mengalami kehancuran dan hampir tak berpenduduk dijadikan ibu kota baru bagi Greece, sebagai simbol kejayaan masa lalu. Hal yang sama terjadi pada saat Perang Dingin dan Reunifikasi Jerman, di mana Berlin menjadi ibu kota lagi bagi Jerman.
2. Rusia memindahkan pemerintahannya dari Mosko ke Sain Petersburg untuk memberikan kebesaran Rusia beorientasi ke barat, hal tersebut merupakan suatu relokasi simbolik dari ibu kota ke lokasi geografis dan demografis dengan alasan ekonomi atau strategi (sering disebut ibu kota masa depan atau ibu kota pelopor).

3. Kemal Ataturk memindahkan pusat pemerintahan dari Ottoman Istanbul ke Ankara.
4. Kaisar Ming memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Beijing untuk menjauhi Mongols dan Manchus.

Ibu kota mempunyai fungsi yang penting, ibu kota senantiasa dijadikan sebagai target utama dalam peperangan, sebab dengan menguasai ibu kota akan menjadi jaminan untuk bisa menguasai sebagian besar musuh atau penentang, sehingga dapat menurunkan moral untuk mengalahkan musuh (militer). Seperti yang terjadi pada masa lalu di China, di mana pemerintahannya sedikit terpusat pada fleksibilitas di tingkat provinsi, dengan ambruknya ibu kota dapat mengakibatkan runtuhnya suatu Dinasti. Oleh sebab itu Dinasti Ming memindahkan Ibu kota Nanjing ke Beijing dengan alasan agar dapat mengontrol musuh yang berasal dari Mongols dan Manchus.

Berkaitan dengan fungsi ibu kota negara yang penting, terdapat pandangan lain bahwa fungsi ibu kota negara kurang penting sebagai sasaran militer. Karena pusat pemerintahan dapat dipindahkan ke tempat lain. Sebagai contoh dalam perang revolusi dan perang tahun 1812 tentara Inggris berulang kali menyerang beberapa ibu kota Amerika, tentara Amerika tetap dapat bertempur dari luar kota, di mana mereka didukung oleh pemerintah setempat dan penduduk civil di perbatasan. Perkecualiannya adalah Perancis, yang birokrasinya terkoordinasi dan terpusat secara efektif serta didukung oleh sumberdaya yang sangat luas, menjadikan negaranya sangat kuat melebihi pesaingnya, akan tetapi dalam strategi militernya memiliki resiko tinggi apabila ibu kota diduduki oleh musuh. Ancaman tradisional dari Perancis adalah Jerman terfokus untuk menguasai Paris. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, ketika Jakarta jatuh oleh tentara Belanda sewaktu perang revolusi ibu kota negara pernah berpindah ke Yogyakarta dan ke Bukit Tinggi. Dengan demikian pemerintahan tetap berjalan, sehingga NKRI tetap berdiri dengan melakukan perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan (Soekanto, 2017).

2. Kondisi Jakarta Sebagai Ibu Kota

Dalam sejarah, asal mula kota Jakarta berawal dari pekan pelabuhan kecil yang dikenal sebagai Sunda Kelapa, kemudian dikenal menjadi Kota Batavia. Seorang pengembara Inggris terkenal yaitu Kapten James Cook menyebutkan pelabuhan tersebut merupakan kawasan labuhan kapal besar dan kecil terbaik di dunia saat itu. Kota yang telah berumur hampir 500 tahun tersebut secara bertahap telah mengalami banyak perkembangan yang positif, namun sering kali terlanda banjir. Menurut catatan sejarah, akibat meluapnya Sungai Ciliwung pada tahun 1872 mengakibatkan jebolnya pintu air sehingga merendam kawasan Batavia. Peristiwa yang sama pernah terjadi pada 9 Januari 1932, akibat hujan yang turun deras sepanjang malam menyebabkan hampir seluruh wilayah kota Batavia terendam banjir. Salah satu upaya penanggulangan banjir Jakarta sebenarnya telah direncanakan sejak masa pemerintahan Belanda tahun 1920 oleh seorang insinyur Belanda bernama Van Breen yang saat itu memimpin pembangunan sejumlah pintu air dan saluran (banjir kanal), untuk mengakomodasi datangnya air.

Masalah banjir Jakarta memang sulit diatasi tanpa ada suatu usaha menyeluruh dan terpadu. Amblesan tanah akibat penurapan airtanah yang berlebih menjadi salah satu penyebab daerah menjadi sasaran banjir. Secara alami Jakarta memang rawan terhadap banjir, karena terletak pada kipas aluvial yang berkembang dari Selatan (Bogor) dan dialiri oleh 13 sungai dengan daerah hulunya bercurah hujan tinggi, yang sebagian lahannya telah terbangun. Faktor alami lainnya adalah di bagian Utara terdapat beting gisik (beach ridges)

yang dapat menghambat aliran ke laut Teluk Jakarta. Sebenarnya pada beting gisik itupun terdapat cekungan antar beting yang dapat berfungsi sebagai penampung air, namun itupun sudah terbangun. Demikian juga sebagian besar situ-situ yang berfungsi sebagai penampung dan pengendali air hujan lokal itupun sudah menjadi lahan permukiman.

Hampir setiap tahun terjadi banjir yang besarnya bervariasi. Banjir yang terjadi tahun 2007 merupakan yang terbesar, hampir mencakup 70% wilayah Jakarta. Akibat banjir 2007 tersebut menimbulkan pemikiran atau gagasan untuk memindahkan Ibu Kota Jakarta. Banjir dijadikan salah satu pemicu ide untuk memindahkan ibu kota. Gagasan untuk memindahkan ibu kota negara telah mengemuka dalam berbagai kesempatan antara lain tanggal 20 Mei 1988 ketika gerakan reformasi. Waktu itu kondisi Jakarta sangat mengkhawatirkan sehingga muncul gagasan spontan, agar Yogya untuk menerima kembali fungsi ibu kota pemerintahan. Pemikiran untuk memindahkan ibu kota Negara juga datang dari Ketua DPR Agung Laksono dengan argumentasi sedikit berbeda, dan menyatakan bahwa Jakarta sudah saatnya kantor presiden yang menjadi pusat pengendali pemerintahan dipindahkan ke tempat yang lebih kondusif. Jakarta saat ini dinilai sudah kelebihan beban, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga Jakarta mempunyai multi fungsi. Ibu kota negara yang mempunyai multi fungsi umumnya akan menimbulkan berbagai dampak (Ayuningtyas dan Rahayu, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Progres IKN menyimak dari portal berita CNBC Indonesia

A. Analisis Struktur Makro

Berita dalam Progres IKN menyimak dari portal berita CNBC Indonesia Mengusung tema "*Ide perpindahan Ibu kota negara*". Topik ini merupakan tema yang diangkat berdasarkan berita yang tengah gencar diberitakan saat ini Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hingga awal tahun 2023, progres pembangunan telah mencapai 12 persen.

Issue susahny dapat investor dalam pembangunan IKN terjawab dalam pertemuan yang mengundang stakeholder dalam negeri dan luar negeri terutama keterlibatan pengusaha besar pribumi, ini menunjukkan progres dan meningkatkan kepercayaan publik atas pembangunan IKN. Skema nol persen APBN berubah menjadi 20 persen APBN dan sisanya swasta atau kapitalis-kapitalis luar negeri dan dalam negeri, ya, benar, dalam kondisi prihatin seperti ini keadaan ekonomi sedang sakit akibat wabah covid19 yang diikuti oleh resesi ekonomi dunia pembangunan IKN menjadi proyek paling ambisius di dunia berani melawan arus menerobos kegalauan ancaman resesi global, kita salut dan mengapresiasi keberanian presiden Jokowi memutuskan sebuah keputusan bersejarah dan fenomenal, kita rakyat Indonesia harus menjadi pendukung utama baik moral maupun materiil ikut mendorong cita-cita luhur pembangunan IKN, bahwa IKN adalah masa depan bangsa agar Indonesia menjadi negara maju lima besar dunia, mestinya kita belajar bagaimana dulu diawal kemerdekaan negara kita ingin memiliki pesawat kepresidenan dan dengan sukarela rakyat Indonesia khususnya dari Aceh menyumbangkan harta bendanya berupa uang dan emas untuk membeli pesawat dan negara kita punya pesawat.

B. Analisis Superstruktur (Skematik)

Penulis mengawali tulisannya dengan rangkaian kalimat yang memiliki makna yang mendalam dan memberi kesan “pemanis” dalam suasana panas pro kontra masyarakat yang telah tercipta.

“Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, terutama untuk infrastruktur dasar. Update terbaru progres pembangunan secara total sudah mencapai 12% dan ditargetkan selesai 2024. Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengungkapkan untuk penyediaan air baku seperti bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku progresnya sudah di atas 80%.”

Konteks: Kalimat di atas ditulis oleh Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia

Rangkaian kalimat yang sarat akan makna mendalam dan tersirat berbagai penekanan “Mengebut” yang ditujukan kepada Presiden Jokowi serta para menteri yang bekerja dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Kalimat-kalimat seperti ini biasanya di letakkan di awal kalimat sebagai kalimat pembuka agar pembaca tertarik untuk mengetahui kelanjutan berita tersebut. Kecakapan pemilihan kata sangat menentukan kualitas isi berita dan menentukan jumlah pembaca karena pemilihan kata yang menarik sangat menentukan ketertarikan pembaca.

C. Analisis Struktur Mikro Semantik

Analisis semantik dalam skema analisis wacana kritis Van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal. Wacana dalam surat kabar ini dapat memiliki makna yang jamak. Mengingat bahasa digunakan sebagai media untuk menggiring isu, kepentingan, juga mengajukan pendapat. Berikut diuraikan data sekaligus pembahasan terkait ranah semantik.

“Keputusan IKN sudah ditetapkan lewat payung hukum undang-undang dan sudah disahkan oleh DPR, artinya 99% perpindahan Ibu kota negara sudah final, tak ada tawar menawar lagi, sebesar apa pun yang menolak dan yang bersuara sumbang. Apa lagi awal tahun 2023 pembangunan infrastruktur dasar semua hampir rampung dari mulai jembatan, jalan untuk mengangkut logistik, rumah hunian untuk pegawai kontruksi dan yang lainnya.”

Penyataan di atas memiliki makna jamak karena dalam satu paragraf, berita tersebut terdiri dari beberapa makna, yaitu (1) Keputusan yang memiliki makna proses penelusuran yang berawal latar belakang masalah, identifikasi, hingga terbentuknya kesimpulan dan diikuti tidak ada tawar menawar, (2) pernyataan yang menolak dan suara sumbang entah ditunjukkan kepada siapa? (3) menjelaskan pembangunan infrastruktur sudah hampir rampung, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembangunan IKN sudah finalisasi di kepemimpinan Presiden Jokowi.

Jadikan rakyat Indonesia pemegang saham tertinggi atas pembangunan IKN, anggaran boleh diambil dari APBN karena APBN juga didalamnya ada pajak rakyat yang pengelola pajaknya harus benar-benar transparan dan akuntabel, bahkan bagi rakyat Indonesia dipinta lebih dari pajak pun akan sukarela berbondong-bondong memberikan sumbangannya untuk kebutuhan negara sebagaimana dulu negara membutuhkan pesawat.

Sintaksis

Analisis sintaksis adalah analisis yang berkaitan dengan susunan dan penataan kalimat dalam wacana. Susunan dan penataan kalimat ini diramu sebaik mungkin dengan harapan tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Berikut akan disajikan analisis sintaksis dalam Progres IKN Menyimak dari Portal Berita CNBC Indonesia

"Korban-korban itu seharusnya diusahakan diminimalisir agar tidak mencoreng cita-cita luhur pembangunan IKN sebagai harapan masa depan bangsa Indonesia, karena yang terdampak dari pembangunan itu yaitu manusia (masyarakat) lingkungan alam dan habitat hewan-hewan yang terganggu."

Pernyataan di atas penekanan kalimat terletak pada kata "itu". Kata "itu" diletakkan di awal kalimat sebagai bentuk penguatan inti pembicaraan. Penguatan ini diharapkan dapat menarik perhatian pembaca. Karena kata "itu" memiliki arti Pembangunan di IKN yang merupakan inti dari wacana tersebut.

Ini bagian dari cara memuliakan rakyat Indonesia yang dilibatkan diajak bicara agar merasa memiliki keberadaan IKN ini, kalau rakyat sudah terketuk hatinya jangankan harta nyawa pun bisa dikorbankan demi kemerdekaan sejati anak cucu bangsa kedepan. Sekema APBN dan swasta akan tuntas dengan skema rakyat Indonesia, cukup dipungut iuran dua ribu rupiah perorang selesai pembangunan IKN, bila benar cita-cita luhur itu demi bangsa dan negara, maka libatkanlah pemilik saham republik ini, yaitu rakyat Indonesia.

Stilistik

Kajian stilistik dalam analisis wacana kritis adalah kajian tentang pilihan kata yang digunakan penutur dalam menyampaikan pesan, maksud, dan ideologinya. Pilihan kata dalam menuangkan pikiran sangat memengaruhi ketertarikan pembaca.

"Infrastruktur Dasar IKN Dibangun, Bakal Anti Banjir?"

Pernyataan di atas Pembangunan fisik atau infrastruktur secara otomatis akan berdampak positif dan negatif, keduanya tak terpisahkan seperti dua mata uang koin. Dampak positifnya tentu menjadi harapan kita semua dan dampak negatifnya membutuhkanantisipasi baik secara preventif dan kuratif. Ada beberapa dampak negatif yang harus diantisipasi, diantaranya claim Paser Penajam Utara tidak banjir karena kontur tanahnya berbukit-bukit tapi di kaki bukit-bukit tersebut ada desa-desa yang sudah berlangganan banjir dan harus segera diatasi disiapkan solusinya. Begitu juga lahan-lahan warga yang sudah digarap secara turun temurun yang kemungkinan akan terjadi sengketa lahan dengan pemerintah alangkah baiknya diberikan saja diberikan legalitasnya agar warga terdampak menjadi aman masa depannya, kegelisahan seperti ini yang menurut pemerintah hal kecil bisa selesai dengan uang tapi bagi hati masyarakat akan meninggalkan luka terdalam sepanjang sejarah IKN.

Retoris

Merupakan kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, biasanya digunakan penulis untuk memperindah gubahannya. Pemberitaan Pada Progres IKN menyimak dari portal berita CNBC Indonesia Dalam tidak terdapat kajian retorik, karena sebagian besar isi dari surat kabar tersebut yaitu sebuah pernyataan.

KESIMPULAN

Partisipasi publik pada proses perencanaan IKN dapat disimpulkan masih dominan dalam kelompok kategori degree of tokenism. Pemberian ruang-ruang partisipasi masyarakat sudah diberikan baik secara formal dalam bentuk diskusi maupun secara informal dalam ruang-ruang media sosial. Meskipun demikian, belum disertai dengan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan pengambilan keputusan. Hal ini dapat menjadi baik jika kepentingan-kepentingan publik sudah turut masuk dan diakomodasi oleh pemegang kebijakan. Selain itu, masih pula terdapat kekhawatiran akan adanya mekanisme partisipasi

semu.

Media sosial, kini sudah berkembang menjadi ruang interaksi yang cukup efisien apabila akan digunakan sebagai ruang partisipasi publik. Engagement antara penduduk dengan isu-isu perkotaan dapat lebih terhubung, daripada era sebelum maraknya pengguna media sosial (Alizadeh et al., 2019). Maka, agar terjadi perdebatan publik yang konstruktif melalui media tersebut, perlu adanya informasi yang lengkap terkait rencana pemindahan IKN. Namun, proses distribusi wacana sepenuhnya dilakukan di media sosial melalui kanal berita dengan tujuan agar dapat dilihat oleh lebih banyak kalangan baik akademisi maupun orang awam. Strategi distribusi yang digunakan bisa saja dipilih karena isu yang diangkat merupakan isu penting dan tengah menjadi pembicaraan nasional. Hasil analisis secara makro menunjukkan hubungan bahwa pemberitaan CNBC Indonesia yang berkaitan dengan isu pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini berisi tentang mayoritas masyarakat di Kalimantan kontra dalam menghadapi isu pemindahan ibu kota. Kekhawatiran dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga muncul dalam menangani isu sosial perlawanan dominasi dari masyarakat Kalimantan terhadap isu tersebut terhadap pengusaha, perusahaan, dan pemerintah dalam hal sengketa lahan.

Di luar itu semua, pemindahan IKN juga membutuhkan penyiapan mekanisme pengendalian pembangunan yang jelas. Kajian mengenai daya dukung dan daya tampung lintas batas administrasi perlu untuk dilakukan sebelum memastikan proyek ini berjalan. Kesiapan untuk saling bekerja sama baik antar pemerintah antar wilayah administrasi, pemerintah antar level, dan antar pemerintah dan masyarakat, serta pemerintah dengan sektor bisnis adalah kunci untuk terselenggaranya proyek pemindahan IKN yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afzalan, N., Sanchez, T. W., & Evans-Cowley, J. (2017). Creating smarter cities: Considerations for selecting online participatory tools. *Cities*, 67, 21–30.
- [2] Alamsyah, N. (2019, Desember 9). Standar Etika Pemindahan Ibu Kota. *Kolom Detik.com*. Diambil dari <https://news.detik.com/kolom/d4815363/standar-etika-pemindahan-ibukota>.
- [3] Alasuutari, P. (2010). The rise and relevance of qualitative research. *International Journal of Social Research Methodology*, 13 (2), 139–155.
- [4] Alizadeh, T., Sarkar, S., & Burgoyne, S. (2019). Capturing citizen voice online: Enabling smart participatory local government. *Cities*, 95, 102400.
- [5] Andjarwati, A. (2019). Pemindahan ibukota negara dalam perspektif hukum agraria, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Diambil dari <http://law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1043/2019/06/IBUKOTA-BARU.pdf>
- [6] Andreas, H., Zainal Abidin, H., Pradipta, D., Anggreni Sarsito, Di., & Gumilar, I. (2018). Insight look the subsidence impact to infrastructures in Jakarta and Semarang area; Key for adaptation and mitigation. *MATEC Web of Conferences*, 147(June 2007), 08001.
- [7] Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35 (4), 216–224.
- [8] Asdak, C., Supian, S., & Subiyanto. (2018). Watershed management strategies for flood mitigation: A case study of Jakarta's flooding. *Weather and Climate Extremes*, 21, 117–122.

-
- [9] Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42 (2), 139–160.
 - [10] Ayuningtyas RN, Rahayu S. Kajian Pemahaman Masyarakat Terhadap Banjir Di Kelurahan Ulujami, Jakarta. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 3: 351–358, 2014.
 - [11] Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10 (1), 46–62.
 - [12] Baiquni M. *Membangun Pusat-pusat di Pinggiran*. Yogyakarta: Ideas, 2004.
 - [13] Bajracharya, B., & Khan, S. (2020). Urban Governance in Australia: A Case Study of Brisbane City. In *New Urban Agenda in Asia-Pacific*, 225–250.
 - [14] Balz, V., & Zonneveld, W. (2020). The Institutionalisation of a Creative Practice: Changing Roles of Regional Design in Dutch National Planning. In *Shaping Regional Futures*, Cham: Springer International Publishing, 27–42.
 - [15] Bedford, T., Clark, J., & Harrison, C. (2002). Limits to new public participation practices in local land use planning. *The Town Planning Review*, 73 (3), 311–331.
 - [16] Bonsón, E., Perea, D., & Bednárová, M. (2019). Twitter as a tool for citizen engagement: An empirical study of the Andalusian municipalities. *Government Information Quarterly*, 36 (3), 480–489.
 - [17] Brabham, D. C. (2009). Crowdsourcing the Public Participation Process for Planning Projects. *Planning Theory*, 8 (3), 242– 262.
 - [18] Burger D.H. *Sejarah Ekonomis Indonesia*. Jakarta: Pradhiyaparamita, 1962.
 - [19] Cardullo, P., & Kitchin, R. (2019). Being a ‘citizen’ in the smart city: up and down the scaffold of smart citizen participation in Dublin, Ireland. *GeoJournal*, 84 (1), 1–13.
 - [20] Chaussard, E., Amelung, F., Abidin, H., & Hong, S. H. (2013). Sinking cities in Indonesia: ALOS PALSAR detects rapid subsidence due to groundwater and gas extraction. *Remote Sensing of Environment*, 128, 150–161.
 - [21] Costa, D., Burlando, P., & Priadi, C. (2016). The importance of integrated solutions to flooding and water quality problems in the tropical megacity of Jakarta. *Sustainable Cities and Society*, 20, 199– 209.
 - [22] Cox, R. (2010). *Environmental and the Public Sphere*, 2 ed, SAGE Publications, Inc.
 - [23] Dahiya, B., & Das, A. (2020). New Urban Agenda in Asia-Pacific: Governance for Sustainable and Inclusive Cities. In *New Urban Agenda in Asia-Pacific*, 3–36.
 - [24] Das, A., & Dahiya, B. (2020). Towards Inclusive Urban Governance and Planning: Emerging Trends and Future Trajectories. In *New Urban Agenda in Asia-Pacific*, 353–384.
 - [25] Dietz, T., & Stern, P. C. (Ed.). (2008). *Public Participation in Environmental Assessment and Decision Making*, National Academies Press.
 - [26] Donaghy, M. M. (2020). Participation Meets Politics: Political Shifts and the Longevity of Participatory Governance Institutions. *PS: Political Science & Politics*, 53 (1), 6–9.
 - [27] Du, G., Kray, C., & Degbelo, A. (2020). Interactive Immersive Public Displays as Facilitators for Deeper Participation in Urban Planning. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 36 (1), 67–81.
 - [28] Fanara, D. (2006). *Angel of East Indies: Biography of the Van Dooremolen Family*, iUniverse. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?hl=id&i>

- d=Vh0j32NRF98C&dq=bandung+as+capital+of+east+indies&q=Bandung+capita
l+East+Indies#v=snippet&q=Bandung capital East Indies&f=false
- [29] Farinosi, M., Fortunati, L., O'Sullivan, J., & Pagani, L. (2019). Enhancing classical methodological tools to foster participatory dimensions in local urban planning. *Cities*, 88, 235–242.
- [30] Firman, T., Surbakti, I. M., Idroes, I. C., & Simarmata, H. A. (2011). Potential climate-change related vulnerabilities in Jakarta: Challenges and current status. *Habitat International*, 35 (2), 372–378.
- [31] Goedkoop, F., & Devine-Wright, P. (2016). Partnership or placation? the role of trust and justice in the shared ownership of renewable energy projects. *Energy Research and Social Science*, 17, 135– 146.
- [32] Goetz, A., & Gaventa, J. (2001). Bringing citizen voice and client focus into service delivery, Brighton. Diambil dari <http://www.ntd.co.uk/idsbookshop/details.asp?id=628>
- [33] Goh, K. (2019). Urban Waterscapes: The Hydro-Politics of Flooding in a Sinking City. *International Journal of Urban and Regional Research*, 43 (2), 250–272.
- [34] Grover, P., Kar, A. K., Dwivedi, Y. K., & Janssen, M. (2019). Polarization and acculturation in US Election 2016 outcomes – Can twitter analytics predict changes in voting preferences. *Technological Forecasting and Social Change*, 145, 438–460.
- [35] Halberstadt, A. G., & Green, L. R. (1993). Social attention and placation theories of blushing. *Motivation and Emotion*, 17 (1), 53–64.
- [36] Harris, L. R., Bessinger, M., Dayaram, A., ... Niekerk, L. Van. (2019). Advancing land-sea integration for ecologically meaningful coastal conservation and management. *Biological Conservations*, 237, 81–89.
- [37] Hassenforder, E., Smajgl, A., & Ward, J. (2015). Towards understanding participatory processes: Framework, application and results. *Journal of Environmental Management*, 157, 84–95.
- [38] He, Q., & Silliman, B. R. (2019). Climate Change, Human Impacts, and Coastal Ecosystems in the Anthropocene. *Current Biology*, 29 (19), R1021–R1035.
- [39] Hermawan. (2019, Agustus 24). Soekarno Gagal Pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya. Diambil 18 Januari 2020, dari <https://www.tagar.id/soekarno-gagalpindahkan-ibu-kota-ke-palangkaraya>
- [40] Huynh, D. (2020). In Making Mega Cities in Asia, 49–69.
- [41] Janti, N. (2019). Rencana Ibukota Pindah ke Surabaya. Diambil 18 Januari 2020, dari <https://historia.id/politik/articles/rencanaibukota-pindah-ke-surabaya-v54g4>
- [42] Johansyah, M., Rupang, P., Apriando, T., ... Prayoga, A. P. (2019). Ibu Kota Baru Buat Siapa?, WALHI, dkk. Diambil dari [https://walhi.or.id/wpcontent/uploads/Laporan Tahunan/FINAL IKN REPORT.pdf](https://walhi.or.id/wpcontent/uploads/LaporanTahunan/FINAL IKN REPORT.pdf)
- [43] Jones, B. C. (2018). Constitutions and bills of rights: Invigorating or placating democracy? *Legal Studies*, 38(3), 339– 359.
- [44] Kalra, S., Pathak, V., & Jena, B. (2013). Qualitative research. *Perspectives in Clinical Research*, 4 (3), 192.
- [45] Latief, H., Putri, M. R., Hanifah, F., Afifah, I. N., Fadli, M., & Ismoyo, D. O. (2018). Coastal Hazard Assessment in Northern part of Jakarta. *Procedia Engineering*, 212, 1279–1286.
- [46] Mapfumo, L., & Mutereko, S. (2020). Contextualising Stakeholder Participation in The

-
- Governance Of Harare's Informal Economy Sector. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 12 (1), 103–118.
- [47] Mayer, H., Sager, F., Kaufmann, D., & Warland, M. (2016). Capital city dynamics: Linking regional innovation systems, locational policies and policy regimes. *Cities*, 51, 11–20.
- [48] Menzel, S., & Buchecker, M. (2013). Does Participatory Planning Foster the Transformation Toward More Adaptive Social-Ecological Systems? *Ecology and Society*, 18 (1), 13.
- [49] Mueller, J., Lu, H., Chirkin, A., Klein, B., & Schmitt, G. (2018). Citizen Design Science: A strategy for crowd-creative urban design. *Cities*, 72, 181–188.
- [50] Neu, D., Saxton, G., Rahaman, A., & Everett, J. (2019). Twitter and social accountability: Reactions to the Panama Papers. *Critical Perspectives on Accounting*, 61, 38–53.
- [51] Nugroho, E. (2013, Januari 18). Palangkaraya Sering Disebut Tempat Pengganti Ibu Kota Negara. Diambil 18 Januari 2020, dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2013/01/18/palangkaraya-sering-disebuttempat-pengganti-ibu-kota-negara>
- [52] Nurhidayah, L., & McIlgorm, A. (2019). Coastal adaptation laws and the social justice of policies to address sea level rise: An Indonesian insight. *Ocean and Coastal Management*, 171, 11–18.
- [53] O'Brien, F. A., Meadows, M., & Griffiths, S. (2017). Serialisation and the use of Twitter: Keeping the conversation alive in public policy scenario projects. *Technological Forecasting and Social Change*, 124, 26–40.
- [54] Park, H., Kwon, S., & Hadi, S. (2016). Land Subsidence Survey and Policy Development in Pantai Mutiara, Jakarta Bay, Indonesia. *Journal of Coastal Research*, 75 (sp1), 1447–1451.
- [55] Prattama, A. N. (2019, April 30). Wacana Pemindahan Ibu Kota pada Era Soekarno dan Sebelumnya.. Kompas. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/18544621/wacana-pemindahan-ibu-kota-pada-era-soekarno-dansebelumnya?page=all>
- [56] Rania, Q. (2017). Using Social Hub Media to Expand Public Participation in Municipal Urban Plans. *Procedia Engineering*, 198, 34–42.
- [57] Rawat, P., & Yusuf, J.-E. (Wie). (2020). Participatory Mapping, E-Participation, and E-Governance. In *Leveraging Digital Innovation for Governance, Public Administration, and Citizen Services: Emerging Research and Opportunities*, IGI Global, 147–175.
- [58] Renald, A., Tjiptoherijanto, P., Suganda, E., & Djakapermana, R. D. (2016). Toward Resilient and Sustainable City Adaptation Model for Flood Disaster Prone City: Case Study of Jakarta Capital Region. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 334–340.
- [59] Riana, F. (2019, April 30). Rencana Pemindahan Ibu Kota Dari Era Soekarno Hingga Jokowi. Tempo. Diambil dari <https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-erasoekarno-hingga-jokowi/full&view=ok>
- [60] Rim, H., Lee, Y., & Yoo, S. (2019). Polarized public opinion responding to corporate social advocacy: Social network analysis of boycotters and advocates. *Public Relations Review*, 101869.
- [61] Salim, W., & Negara, S. D. (2016). Why is the High-Speed Rail Project so Important to Indonesia. *ISEAS Yusof Ishak Institute*, (16), 1–10.

-
- [62] Sanoff, H. (2005). Participatory Planning Revisited. *Journal of Architectural and Planning Research*, 22 (2), 179–180.
- [63] Seetharam Sridhar, K., Gadgil, R., & Dhingra, C. (2020). Good Governance in the Transparency, Accountability, Public Participation and Capacity (TAP-C) Framework. In *Paving the Way for Better Governance in Urban Transport*, Singapore: Springer Singapore, 1–18.
- [64] Siregar, C. N., & Rahmansyah, S. (2019). Persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap implementasi program jabar digital dalam akun instagram ridwan kamil sebuah kajian sosio-digital. *Jurnal Sosioteknologi*, 18 (3), 369–380.
- [65] Soekanto. Yogyakarta Ibukota Perjuangan. Yogyakarta: Salemba, 2017.
- [66] Syamsudin, F., & Lestari, S. (2017). Dampak Pemanasan Pulau Perkotaan (Urban Heat Island) Pada Peningkatan Tren Curah Hujan Ekstrem Dan Aerosol Di Megapolitan Jakarta Sejak Tahun 1986. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 18 (1), 54.
- [67] Takagi, H., Esteban, M., Mikami, T., & Fujii, D. (2016). Projection of coastal floods in 2050 Jakarta. *Urban Climate*, 17, 135–145.
- [68] Takamura, Y., & Tone, K. (2003). A comparative site evaluation study for relocating Japanese government agencies out of Tokyo. *Socio-Economic Planning Sciences*, 37 (2), 85–102.
- [69] Taufik, M. (2013, September 10). Sampai di mana tim pemindahan ibu kota bekerja? Diambil 18 Januari 2020, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/sam-pai-di-mana-tim-pemindahan-ibu-kotabekerja.html>
- [70] The Editors of Encyclopædia Britannica. (2019). Humanistic Psychology. In *Encyclopædia Britannica*, Encyclopædia Britannica, inc. Diambil dari <https://www.britannica.com/science/humanistic-psychology>
- [71] Tjumano D. Ibukota Negara Pindah Kemana? [Online]. *Jurnal Intelijen*: 2017. <http://jurnalintelijen.net/2017/05/16/ibukotanegara-pindah-kemana/> [26 Apr. 2018].
- [72] Tseng, M. L., Lin, C., Remen Lin, C. W., Wu, K. J., & Sriphon, T. (2019). Ecotourism development in Thailand: Community participation leads to the value of attractions using linguistic preferences. *Journal of Cleaner Production*, 231, 1319–1329.
- [73] United Nations Industrial Development Organization. (2015). *Industrial Development Report 2016: The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development*, Vienna.
- [74] Widowati, H. (2019, April 30). Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara, dari Era Soekarno hingga Jokowi. *Katadata*. Diambil dari <https://katadata.co.id/berita/2019/04/30/wacana-pemindahan-ibu-kota-negara-dariera-soekarno-hingga-jokowi>
- [75] Wu, F. (2007). Re-orientation of the city plan: Strategic planning and design competition in China. *Geoforum*, 38 (2), 379–392.
- [76] Yaqub, U., Chun, S. A., Atluri, V., & Vaidya, J. (2017). Analysis of political discourse on twitter in the context of the 2016 US presidential elections. *Government Information Quarterly*, 34 (4), 613–626.
- [77] Zhang, S. (2019). Public participation in the Geoweb era: Defining a typology for geo-participation in local governments. *Cities*, 85, 38–50.
- [78] Zhu, A. Y. F., Chan, A. L. S., & Chou, K. L. (2019). Creative social media use and political participation in young people: The moderation and mediation role of online political

expression. Journal of Adolescence, 77, 108–117.

- [79] Zuraya, N., & Pratiwi, I. (2020, Maret 3). Tiga Negara Tawarkan Bantuan Desain Ibu Kota Baru. Diambil 19 Januari 2020, dari <https://nasional.republika.co.id/berita/q3irmu383/tiga-negara-tawarkan-bantuandesain-ibu-kota-baru>